

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia saat ini sangat bergantung pada aktivitas-aktivitas perusahaan di dalamnya. Dengan semakin berkembangnya dunia saat ini, maka persaingan perusahaan semakin ketat terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Perusahaan dituntut untuk mampu menentukan kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan dapat menjamin kelangsungan hidupnya (Muflihati, 2015). Setiap perusahaan harus dapat bersaing dengan keadaan perekonomian yang semakin ketat dengan menjaga kualitas kinerja. Kinerja perusahaan yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja buruk, tidak stabil serta profit yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor (Nugroho, 2014). Dengan kinerja perusahaan yang baik maka kita juga bisa mendapatkan *profit* yang tinggi.

Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan (Desiana dkk., 2016). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 2012). Bagi pimpinan perusahaan, profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur berhasil atau tidak perusahaan yang dipimpinnya, sedangkan bagi karyawan perusahaan semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh

perusahaan, maka ada peluang untuk meningkatkan gaji karyawan (Muawaningsih, 2013). Peningkatan profitabilitas merupakan sasaran dari setiap perusahaan. Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan salah satunya dapat dicapai melalui terciptanya tata kelola yang baik di dalam perusahaan.

Pengelolaan perusahaan dalam upaya pencapaian keuntungan dan kelangsungan secara seimbang, dapat dicapai melalui penerapan *Good Corporate Governance* (Daniri, 2006). *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta (Desiana dkk., 2016). Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dewasa ini, dunia usaha semakin dinamis. Perkembangan kemampuan perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting agar dapat bertahan di pasar global. Sehingga tidak heran bahwa kini perusahaan berkompetisi meningkatkan daya saingnya di berbagai bidang. Salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas perusahaan adalah dengan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penerapan GCG dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. GCG diharapkan tidak hanya fokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga bagi *stakeholders*, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut (Effendi dkk., 2013). *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum). Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi (keterbukaan). Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Fadhilah, 2014).

Di negara – negara berkembang dituntut untuk bisa menerapkan sistem yang baru dan lebih baik lagi dalam mengelola bisnis yang berdasar kepada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan atau yang sering disebut *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan kerangka peraturan (Nasution & Doddy, 2007). Untuk mengawasi kinerja dalam perusahaan diperlukan adanya penerapan GCG. Implementasi penerapan GCG meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,

dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Fadhilah (2014) implementasi penerapan GCG meliputi dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Dalam penelitian ini implementasi penerapan GCG yang dipakai adalah dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit karena menurut peneliti implementasi penerapan GCG tersebut yang memegang peranan penting dalam perusahaan.

Dalam kasus Permata Bank yang merupakan hasil penggabungan dari 5 bank nasional dan telah dikelola oleh 7 dewan komisaris dan 8 dewan direksi, bank ini memperoleh peningkatan laba karena adanya jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi yang efektif untuk mengatur dan mengawasi dalam perusahaan. Dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan untuk mengawasi kegiatan dan kepengurusan perusahaan. Jumlah dewan komisaris di setiap perusahaan tidak sama karena hal tersebut tergantung pada operasional perusahaan. Dewan komisaris yang terlalu banyak dalam perusahaan akan membuat keefektifan perusahaan berkurang. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) yang menyebutkan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Dewan komisaris di setiap perusahaan dalam melakukan pekerjaannya dibantu oleh dewan direksi. Dewan direksi juga memegang peranan penting dalam perusahaan karena bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Dewan direksi merupakan pihak yang mempunyai

tanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan (Tjandra, 2015). Tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota direksi adalah saling berkaitan dan mengikat serta merupakan tanggung jawab sesama anggota direksi pada perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan paling kurang terdapat 3 (tiga) orang anggota direksi dalam perusahaan untuk perusahaan yang memiliki aset sampai Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Dalam mengelola perusahaan yang baik akan terlihat apabila perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan komite audit.

Dalam suatu perusahaan dibutuhkan pihak yang independen untuk mengawasi keuangan di perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan membutuhkan komite audit yang mampu mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal, karena tanggung jawab dari komite audit adalah untuk mengawasi *internal control* dan laporan keuangan perusahaan (Framudyo, 2009). Komite audit dapat mengurangi aktivitas *earning management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba (Siallagan, 2006). Berdasarkan KNKG (2006), disebutkan bahwa dewan komisaris didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh komite audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Untuk penelitian ini implementasi penerapan GCG yang dipakai adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit. Peneliti memakai implementasi penerapan GCG tersebut karena menurut peneliti hal tersebut yang terpenting dalam sebuah perusahaan. Sedangkan, profitabilitas akan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) karena rasio tersebut sering diberlakukan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sektor yang sama. Objek penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi dikarenakan merupakan salah satu perusahaan yang memegang peranan penting dalam kebutuhan konsumen. Permintaan akan barang konsumsi akan selalu naik meskipun kondisi ekonomi di Indonesia saat ini tidak terlalu bagus.

Bukti penelitian Desiana, dkk (2016) mengenai pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap profitabilitas (ROE). Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia dengan mengambil 5 sampel bank islam di Indonesia pada tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE). Dan juga penelitian Tjondro & Wilopo (2011) mengenai dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada bank di Indonesia dengan mengambil 26 sample bank yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini adalah . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas

Demikian juga dengan Wicaksono (2012) mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* (dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit) Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Diambil sampel 58 perusahaan dalam

penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel dewan komisaris, variabel dewan direksi dan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Sama halnya dengan penelitian Tjandra (2015) mengenai ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap profitabilitas di perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian dilakukan di 40 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Begitu pula dengan penelitian Heriyanto & Imam (2016) mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit terhadap profitabilitas. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 40 perusahaan manufaktur selama 3 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi yang merupakan GCG dari segi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE, sedangkan pengaruh komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE dan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : *“Pengaruh Implementasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Consumer Good yang listing di BEI Tahun 2013-2015 ”.*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti bermaksud menyusun rumusan masalah mengenai implementasi penerapan GCG terhadap profitabilitas. Implementasi penerapan GCG ada 5 yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit, tetapi dalam penelitian ini peneliti jabarkan yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit, sehingga rumusan masalah penelitian secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap profitabilitas.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan:



1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan permasalahan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk dapat lebih maksimal dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mendorong agar sistem GCG di perusahaan dapat menjadi lebih baik.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan para investor sebelum berinvestasi.

